

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**EVALUASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL KPM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DESA SUMENGKO KECAMATAN
KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023**

Tim Peneliti:

Dr. Rupiarsieh, S.Sos.,M.Si
Septi Wulandari, S.Sos.,M.Si
Tri Setya Wulandari

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 2 Tahun Anggaran 2023/2024

Nomor Kontrak

78/LPPM-LIT/UBIV/2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Evaluasi Program Bantuan Sosial Kpm Bagi Masyarakat Miskin Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Dr. Rupiarsieh, S.Sos.,M.Si.
 - b. NIDN : 0705106101
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : arsieh_sakti@fisip.unigoro.ac.id
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Dosen : Septi Wulandari, S.Sos.,M.Si
 - b. NIDN : 0709099901
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : septiwuland09@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Mahasiswa : Tri Setya Wulandari
 - b. NIM : 20632011142
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
4. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
6. **Lokasi Penelitian** : -
7. **Dana Diusulkan** : Rp. 3.000.000,00

Bojonegoro, 23 September 2024

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Laily Agustina R, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Dr. Rupiarsieh, S.Sos.,M.Si.
NIDN. 07 0510 6101

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian internal dosen yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Sosial Kpm Bagi Masyarakat Miskin Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan proposal penelitian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terimakasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mengajukan proposal penelitian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu	8
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Jenis Penelitian	13
3.2 Fokus Penelitian	13
3.3 Teknik Penentuan Informan	13
3.4 Teknik Pengumpulan Data	14
3.5 Manajemen Data	15
3.6 Metode Analisis Data	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Hasil dan Pembahasan	18
BAB V PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2023.....	2
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. Informan Penelitian.....	14

ABSTRAK

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, program KPM yang dibuat untuk keluarga miskin berupa bantuan pangan non tunai diberikan berupa satu kantong beras 10kg. Metode yang digunakan yaitu deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan teori evaluasi dari William N. Dunn yang menunjukkan bahwa dalam kriteria efektivitas sudah berjalan secara efektif meskipun tidak dapat dipungkiri dalam penetapan penerima belum optimal karena keterbatasannya stok beras dibandingkan jumlah keluarga atau masyarakat miskin. Sehingga terjadi tidak terealisasi pemerataan bantuan sosial tersebut, respon masyarakat penerima sangat baik meskipun belum merata. Peneliti menyarankan agar peran serta fungsi seluruh aparat pelaksana ditingkatkan serta pemberian sanksi yang tegas apabila terjadinya penyelewengan, pemberian sosialisasi seharusnya dilakukan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. **Kata Kunci:** Program KPM; masyarakat miskin; Desa Sumengko

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman suku, kebiasaan, adat, kehidupan, dan agama itu ciri masyarakat Indonesia. Sebagai Negara berkembang masyarakat Indonesia rata-rata tergolong menengah keatas, akan tetapi sebagian juga masih tergolong masyarakat miskin. Indonesia memperlihatkan penurunan kemiskinan dimana penghasilan masyarakat masih di bawah rata-rata.

Masyarakat yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak mempunyai sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan itu merupakan kemiskinan. Akan tetapi dengan berkurangnya kelompok tersebut, masyarakat yang perlu dibantu yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinan untuk bangkit dan keluar dari keadaan tersebut dan maka dari itu untuk menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang akan berjalan lebih lambat dari sebelumnya.

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Basic needs approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar merupakan konsep yang dipakai BPS dan beberapa negara lainnya, oleh sebab itu kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) dapat disebut kemiskinan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel) disebut juga Penduduk Miskin. BPS merilis angka kemiskinan dari data makro dan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan

atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential. Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan oleh Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah guna pemenuhan kebutuhannya dalam rangka membantu kebutuhan pokok berupa beras 10kg sebagai pertimbangan dari dukungan pemerintah yang harus terus dan tetap dilakukan.

Tabel 1. Data Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Kemiskinan
1.	2019	25,14 Juta	9,41%
2.	2020	26,42 Juta	9,78%
3.	2021	27,54 Juta	10,14%
4.	2022	26,16 Juta	9,54%
5.	2023	25,90 Juta	9,36%

Sumber : BPS, 2023. (Data Olah)

Tercatat pada bahan Pusat Statistik (BPS) bahwa persentase kemiskinan di Indonesia terus menuju pada titik terendah dan untuk persentase kemiskinan pada Mater 2023 yakni sebesar 9,36 persen. Dengan persentase tersebut maka jumlah penduduk miskin atau yang memiliki pendapatan per kapita tiap bulan berada dibawah garis kemiskinan yakni mencapai 25,90 Juta orang. Dan jika dilihat lebih rinci lagi akan terlihat bahwa terjadi kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2019 diangka 25,14 Juta naik hingga angka 27,54 Juta ditahun 2021 namun setelah itu mengalami penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,38 Juta di tahun 2022 dan mengalami penurunan 260 Ribu jiwa ditahun 2023 dan kini sudah mencapai 25,90 Juta jiwa. Akan tetapi meskipun secara keseluruhan total atau presentase kemiskinan di Indonesia menurun, namun dalam kenyataan masih terdapat permasalahan mengenai tingginya disparitas kemiskinan antara

Masyarakat kota dan Masyarakat desa yakni 7,29% angka kemiskinan di kota besar dan 12,22% angka kemiskinan di desa, jadi perlu ada Upaya lebih keras lagi untuk menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.

Maka dari itu, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, lalu Pemerintah Indonesia sudah mengembangkan beberapa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi masalah kemiskinan. Berbagai program dilakukan untuk menunjang kemiskinan di Indonesia, dengan berbagai cara dilakukan oleh beberapa lembaga dan instansi pemerintah. Seperti memberi bantuan sosial di salurkan, salah satunya bantuan pangan non tunai.

Menurut UU Nomor 13 tahun 2011 disebutkan: “Fakir miskin adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya”. Namun pemberian bansos selama ini di desa sumengko ada yang belum tepat sasaran, ada beberapa masyarakat yang bisa di sebut mampu tetapi ikut menerima bansos. Bansos terakhir di bulan februari dapat 207-300 kantong yang berisi 10kg beras. Dan maka dari itulah bansos tidak dapat dibagi rata. Efektifitas didalam program ini belum mencukupi tujuan. Karena kurangnya pasokan beras dibanding dengan warga yang membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian tugas akhir yang berjudul: Evaluasi Program Bantuan Sosial KPM Bagi Masyarakat Miskin Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah ditemukan suatu masalah maka penelitian dapat segera dilakukan oleh peneliti dengan lebih mudah. Jika terjadi penyimpangan yang ada dalam kenyataan pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan yang seharusnya dicapai tidak terealisasi maka keadaan tersebut dapat disebut suatu

masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Sosial KPM Bagi Masyarakat Miskin Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dilakukan untuk Evaluasi Program Bantuan Sosial KPM Bagi Masyarakat Miskin Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun bantuan ide yang ditunjukkan agar pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang administrasi public dan dapat menambah peningkatan pengetahuan atau wawasan bagi penulis mengenai Evaluasi Program Bantuan Sosial KPM Bagi Masyarakat Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Bahan pertimbangan dan masukan yang lebih baik untuk evaluasi program bantuan sosial KPM bagi Masyarakat miskin desa sumengko kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro taun 2023.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam mengevaluasi maupun melihat sejauh mana keberhasilan dari program bantuan sosial KPM bagi Masyarakat desa Sumengko.

c. Bagi Universitas Bojonegoro

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi peningkatan peningkatan kualitas Pendidikan dan dapat menambah referensi penelitian dengan topik tentang evaluasi bantuan sosial KPM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Evaluasi merupakan proses yang digunakan untuk menilai pada berjalannya suatu program dengan tujuan pengidentifikasian apakah program tersebut sudah berjalan sesuai rencana dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat hasil akhir program yang telah dilaksanakan kemudian dapat diperbandingkan dengan hasil yang dicapai sebagai tujuan awal dari program. Evaluasi juga digunakan dalam jalannya suatu program sebagai proses penilaian dan pengkajian ulang guna untuk memperbaiki suatu program agar dapat sesuai dengan rencana awal.

Evaluasi seringkali digunakan untuk mengukur dan menilai dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak terkait. Dalam penilaian serta pengukurannya saling berkaitan satu sama lain. Untuk pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan penggunaan dasar baik maupun buruknya sebagai ukuran..

Abdul Basir (1996), arti evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, prediktif, dilaksanakan dengan secara sistematis serta juga bertahap untuk dapat menentukan keputusan dalam usaha memperbaiki pendidikan.

Fokus dari evaluasi adalah nilai program maupun kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Evaluasi bertujuan untuk menentukan kegunaan serta manfaat dari suatu kebijakan maupun program yang berkaitan dengan suatu program kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan evaluasi berkesinambungan dengan prosedur secara menyeluruh dalam tujuan evaluasi dan sasaran dari suatu kegiatan yang sudah terlaksana.

Evaluasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengukur atau menilai dari jalannya suatu program dengan tujuan mengidentifikasi apakah program tersebut sudah berjalan sesuai rencana dan berhasil mencapai tujuan

yang diinginkan atau tidak. Berdasarkan teori yang digunakan oleh Willian N. Dunn yang menyatakan kriteria evaluasi program pemerintah sebagai berikut:

1. Efektifitas, berkaitan dengan Tingkat pencapaian tujuan program yaitu apakah suatu program dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana awal program atau tidak. Namun didalam program ini belum mencukupi tujuan. Karena kurangnya pasokan beras disbanding dengan warga yang membutuhkan.
2. Efisiensi, berkaitan dengan sejumlah usaha yang dilakukan guna pencapaian Tingkat efektifitas dari pelaksanaan suatu program. Dapat pula dikatakan sebagai usaha atau cara yang dipulih guna mencapai hasil dari program yang diharapkan sesuai rencana awal.
3. Kecukupan, berkaitan dengan besarnya pencapaian Tingkat efektifitas sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi nilai atau kesempatan yang menjadi penyebab datangnya masalah yang memerlukan Solusi guna mengatasinya. Dengan kata lain guna mengidentifikasi pengaruh tercapainya hasil yang menjadi harapan dari proses pemecahan masalah yang harus dihadapi. Namun kecukupan dari bantuan ini bisa dibilang belum 100% mencukupi.
4. Pemerataan, berkaitan dengan usaha yang dilakukan guna pemerataan kebijakan. Namun pemberian bansos selama ini di desa sumengko ada yang belum tepat sasaran, ada beberapa masyarakat yang bisa di sebut mampu tetapi ikut menerima bansos. Bansos terakhir di bulan februari dapat 207-300 kantong yang berisi 10kg beras. Dan maka dari itulah bansos tidak dapat dibagi rata.
5. Responsivitas, berkaitan dengan bagaimana suatu program sebagai bentuk dari adanya kebijakan mampu memenuhi segala kebutuhan yang ada sehingga akan didapatkan nilai dari kelompok Masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Banyak Masyarakat yang responsive dengan adanya bantuan tersebut namun saying sekali bantuan tersebut

masih belum merata ke semua warga kurang mampu.

6. Ketepatan, didalam tahap ini Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dapat diketahui dari tujuan kebijakan yang telah tercapai sehingga terdapat nilai guna bagi kelompok Masyarakat yang menjadi sasaran, dan dapat dilihat suatu perubahan sebagai pengaruh sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat. Disini kuang adanya ketepatan dalam pembagian.

Oleh sebab itu teori penelitian yang dikemukakan oleh Willian N. Dunn peneliti menggunakannya sebagai bahan acuan penelitian, teori ini dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian pada kebijakan dengan enam unsur yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sesuai yang dijelaskan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Memuat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (sekurang-kurangnya 5 penelitian) di sajikan dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan tahun termuda ke tahun tertua.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. <i>Journal of Civic Education</i> , 4(1), 7-17.	Kualitatif Deskriptif	Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.	Dampak dari pelaksanaan program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang belum optimal. Hal ini dikarenakan tujuan kebijakan BPNT belum tercapai.
2	Wulandari, N. (2021). <i>Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemberdayaan</i>	Kualitatif Deskriptif	EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	proses pelaksanaan PKH di Kecamatan

	<i>Masyarakat Miskin Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar</i> (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).		DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR	Panakkukang telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat bahwa PKH mendapatkan respon baik dari masyarakat hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang ingin memperoleh bantuan PKH dan peserta PKH merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Adapun kekurangan dari pelaksanaan PKH yaitu Proses pemuktahiran data kondisi perekonomian masyarakat harus rutin dilakukan, PKH harus lebih memfokuskan pada proses pendampingan yaitu pemberian motivasi, edukasi serta membuat kegiatan bersifat produktif agar KPM PKH cepat berdaya dan integritas pemda, pelaksana tugas PKH dan
--	---	--	--	---

				peserta PKH harus lebih ditingkatkan.
3	Wiwit, W., & Kamil, M. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. <i>GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> , 13(1), 1-12.	Kualitatif Deskriptif	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu	pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam monitoring dan evaluasi program BPNT

				yaitu pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua yaitu waktu
4	Alfenia, N., Nababan, R., & Adiarsa, S. R. (2023). EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG. <i>NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial</i> , 10(4), 1581-1588.	Kualitatif Deskriptif	EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG	program BPNT di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik, dikarenakan SDM yang tersedia belum memadai, proses penyaluran dan pemanfaatan dana belum terlaksana dengan baik, KPM BPNT belum menerima bantuan sesuai dengan haknya, serta masih belum tepatnya sasaran penerima BPNT.
5	Nisa, N. K. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pandemi Covid-19. <i>Jurnal Darma Agung</i> , 31(3), 461-472.	Deskriptif analisis	EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PANDEMI COVID-19	perlu dilakukan evaluasi terhadap pencariannya serta adanya penambahan bantuan diharapkan bisa segera direalisasikan. Kebijakan terkait dengan program PKH

				sudah memenuhi unsur dari efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaannya.
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul di atas, pola komunikasi bukanlah sesuatu yang dapat didefinisikan atau diukur dengan angka. Pola komunikasi hanya bisa dijelaskan melalui kata-kata. Oleh karena itu, metode penelitian yang cocok untuk menganalisis fenomena tadi adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif berfokus pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang diperoleh peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan hingga manfaat penelitian ini, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut pendapat sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2020:18). Sedangkan metodologi penelitian kualitatif menurut Staven Dukeshure dan Jennifer Thurlow (2002 dalam Sugiyono 2018:3) merupakan penelitian yang berkenaan dengan data yang bukan bersifat angka, mengumpulkan dan menganalisis dengan data yang bersifat naratif. Berdasarkan kedua pemahaman dari kedua tokoh tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa bagi instrumen kunci, teknik pengumpulan Data dilakukan secara gabungan dan data yang diperoleh bukan bersifat angka tetapi bersifat naratif.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Menurut Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumentasi dan lain lainnya (Moleong, 2010:157)

1. Sumber Data Utama

Sumber data utama dari kata kata dan tindakan dari orang orang yang diamatai atau diwawancara. Sumber data didapatkan melalui catatan tertulis pengambilan video, foto, dan audio. Wawancara untuk memperoleh data dari narasumber dengan kuesioner sebagai panduan dan pengamatan secara langsung di lapangan tanpa adanya perantara.

2. Sumber Data Tambahan

Sumber data tambahan merupakan sumber data diluar tindakan dan kata, seperti dari majalah ilmiah, buku, dokumen pribadi, arsip, internet dan lain sebagainya yang dapat memberikan tambahan sebagai penguat data peneliti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penambahan data diluar data utama sangat diperlukan sehingga peneliti mendapatkan banyak data tambahan.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Rudi Setyawan	Kepala Desa	1 orang
2.	Ana Sriyuanita	Pemdes	1 orang
3.	Rini Wihati Eri Handayani Agung	Masyarakat Penerima Manfaat	2 orang
4.	Sukayat	Masyarakat berpenghaslan rendah namun tidak menerima Bansos	1 orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang lengkap objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta sesuai dengan penelitian dengan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data, informasi serta fakta terkait maka penggunaan beberapa metode peneliti dalam lapangan untuk pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan pengambilan data yang dilakukan secara langsung atau terlibat

dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk teknik pengumpulan data yang dilakukan bertanya kepada narasumber atau informan terkait dengan pokok permasalahan. Wawancara sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung oleh nerasumber. Wawancara juga diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007: 72). Penggalan informasi yang disampaikan oleh informan dengan melakukan wawancara terstruktur dan secara mendalam. Penggunaan pedoman wawancara yang memuat garis besar pokok pokok permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data pendukung dan data tambahan melalui dokumen yang terkait dapat disebut dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat arsip, mempelajari yang ada kaitannya dengan masalah yang kan diteliti sebagai bahan analisis.

3.5 Managemen Data

Dalam penelitian suatu kegiatan pengelolaan informasi yang telah didapat dengan cara melakukan pengumpulan dan pencatatan data guna sebagai masukan peneliti dapat disebut sebagai management data, pengelolaan informasi menjadi pentuk suatu dokumen akurat, teknik penambahan data baru dalam kurun waktu yang berbeda dan merubah merubah data awal dengan tujuan menjaga kemutakhiran, guna terpenuhinya kebutuhan informasi bagi para pengguna yang membutuhkan tahapan penyusunan data.

3.6 Metode Analisis Data

Langkah untuk pengumpulan data kualitatif yaitu dengan cara wawancara,

focus group discussion dan observasi. Teknik ini untuk pengumpulan data secara mendalam antara peneliti dan narasumber. Wawancara bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka dan bisa dilakukan via online. Focus group discussion dilakukan dengan diskusi bersama responden. Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi atau objek penelitian. Sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dapat disebut dengan teknik analisis data sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Miles dan huberman menjelaskan bahwa dalam kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus hingga dtanya sudah jenuh (Miles dan ahuberman, 2009: 41). Adapun secara skematis empat tahapan dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara serta pengamatan dan dokumentasi dicatat dalam pencatatan lapangan yang terdiri dua spek yakni refleksi dan deskripsi. Catatan deskripsi adalah data yang berisi apa yang didengar, dilihat, disaksikan, dirasakan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai dan untuh bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. Agar mendapatkannya maka peneliti melakukan wawancaa dan observasi terhadap beberapa narasumber atau informan.

2. Reduksi Data

Seleksi data, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan merupakan reduksi data. Dilakukan selama penelitian berlangsung selama di lapangan sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan dengan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat diambil dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Informasi dan data yang didapatkan dimasukan ke dalam suatu matriks, data disajikan dalam penelitian di lapangan sehingga peneliti dapat dapat menguasai dan tidak salah dalam menganalisis data dalam menarik kesimpulan. Penyajian ini bertujuan untuk penyederhanaan informasi sehingga mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Usaha untuk mencari atau memahami makna, kejelasan pola, dan alur sebab akibat dapat disebut dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara mempertanyakan serta melihat kembali catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

1) Efektivitas

Menurut Bapak Mahaji selaku BPD: “Pada tahun 2018 Desa Sumengko mengajukan permohonan bantuan sosial berupa beras 10kg untuk KPM dan mendapatkan kuota 100-150 kantong beras. Tapi sebenarnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat jumlahnya lebih dari kuota yang diberikan jadi tidak semua KPM mendapatkan bantuan tersebut.” (Wawancara hari Rabu, 24 Juni 2024)

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Kepala Desa Sumengko, Bapak Rudi Setyawan, sebagaimana berikut: “Desa Sumengko mendapatkan bantuan sosial berupa beras 10kg untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kita ajukan dari pusat dengan mendapatkan 100-150 kantong beras yang berisi 10kg perbulan, namun realita yang didapatkan bansos tersebut cair di 2 bulan sekali yang jumlahnya didobel menjadi 207-300 kantong beras dan menjadikan setiap warga mendapat 2 kantong beras setiap 2 bulan sekali. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan dan membantu kebutuhan pokok para KPM.” (Wawancara hari Rabu. Juni 2024)

Dengan demikian pelaksanaan program bansos beras sebagai program yang dikhususkan masyarakat miskin tepatnya di Desa Sumengko sudah menunjukkan hasil yang efektif karena sangat membantu masyarakat miskin dari segi kebutuhan pokok. Meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa warga miskin yang tidak mendapatkan bansos tersebut karena kurangnya pasokan beras yang ada.

2) Efisiensi

Melalui Keputusan Menteri Sosial No.4/HUK/2018, tanggal 2 Januari 2018, Pemprov dan Pemkab/Pemkot dapat mengalokasikan pada APBD belanja bansos untuk menambah pagu penerima bansos pangan

bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam daftar KPM sesuai dengan kemampuan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan.

Kepala Desa Sumengko mengatakan bahwa terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa, sebagaimana berikut: “Kami dari pihak desa menyiapkan data KPM kemudian diserahkan ke pusat dengan pendampingan dari BPD untuk mendapatkan bantuan sosial beras tersebut.” (Wawancara hari Rabu, 24 Juni 2024)

Pernyataan Kepala Desa Sumengko tersebut menunjukkan bahwa usaha pemerintah desa adalah mendata masyarakat miskin dan megajukannya ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bansos tersebut, yang mana pada tahun 2023 secara keseluruhan terdapat 133 penerima yang merupakan hasil seleksi pemerintah desa dari 1.132 masyarakat miskin.

Efisiensi pelaksanaan program bansos beras untuk KPM ini merujuk pada sumber dana serta besarnya bantuan sosial, tim pelaksana program dan bagaimana pihak terkait dalam menjalankan program. Keberhasilan suatu program juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat miskin.

3) Kecukupan

Menurut Kepala Desa Sumengko terkait kecukupan bansos, sebagaimana berikut: “Masyarakat desa yang tidak mampu sangat mengharapkan bantuan sosial tersebut, namun dikarenakan kurangnya pasokan beras yang didapat menjadikan beberapa masyarakat tidak mendapatkan bantuan tersebut.” (Wawancara hari Rabu, 24 Juni 2024)

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa masyarakat tidak mampu sangat berharap mendapatkan bantuan sosial tersebut namun realitanya tidak semua masyarakat miskin mendapatkannya karena kurangnya pasokan beras yang diterima. Dengan demikian dapat dikatakan tidak tercapainya kecukupan dalam program tersebut.

4) Pemerataan

Semua penerima bantuan sudah seharusnya menerima sosialisasi, yaitu sosialisasi mengenai bantuan sosial beras bagi KPM di Desa Sumengko. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan tujuan dari program tersebut. Namun kenyataannya sedikit melenceng, berikut pernyataan dari ibu Eri Handayani selaku KPM yang tidak mendapatkan bantuan tersebut:

“Sebenarnya saya tidak tau adanya bantuan beras itu, tapi saya tau tetangga saya mendapatkan bantuan itu, tapi saya tidak mendapatkan bantuan beras itu, gak tau kenapa kok saya tidak mendapatkannya, seharusnya bantuan tersebut lumayan membantuku untuk mengurangi beban kebutuhan pokok” (Wawancara hari Kamis, 23 Mei 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan belum merata, karena sosialisasi bersifat selektif. Pada indikator pemerataan dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Sumengko terdapat berbagai permasalahan yakni penerimaan bansos beras di Desa Sumengko selama ini belum tepat sasaran sehingga diperlukan adanya evaluasi oleh pemerintah agar program dapat berjalan sesuai tujuan.

5) Responsivitas

Penerima bansos di Desa Sumengko sejauh ini bersifat sangat positif dan diharapkan program ini dapat berjalan terus. Respon dari masyarakat yang bukan penerima bansos juga sangat baik, namun masyarakat tidak mampu yang tidak menerima bansos tersebut responnya berbanding terbalik, ada kecemburuan di sini. Seperti yang dinyatakan beberapa masyarakat sebagai berikut:

Masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan sosial:

“Seneng bisa mendapatkan bantuan” (Bapak Dapar, hari Kamis 23 Mei 2024)

“Bersyukur saja” (Ibu Supingah, hari Kamis 23 Mei 2024)

“Pastinya senang ya” (Ibu Yatmi, hari Kamis 23 Mei 2024)

“Sangat bersyukur mbak bisa ngeringanin” (Ibu Yasirah, hari Kamis 23 Mei 2024)

“Ya senang sekali mbak” (Ibu Kawiyah, hari Kamis 23 Mei 2024)

“Ya alhamdulillah mbak bersyukur” (Ibu Rini Wihati, hari Kamis 23 Mei 2024)

Masyarakat tidak mampu yang tidak menerima bantuan sosial:

“sebenarnya saya juga membutuhkan bantuan tersebut tapi ya gimana lagi kalo gak dapat, sebenarnya lumayan ya buat meringankan kebutuhan makan” (Bapak Sukayat, hari Kamis 23 Mei 2024)

Dengan demikian, diharapkan agar program ini dapat berjalan terus dan diperlukan penambahan kuota agar seluruh masyarakat tidak mampu atau KPM mendapatkan bantuan tersebut.

6) Ketepatan

Berikut pernyataan Ibu Samijah selaku penerima yang merasakan kontribusi dari adanya program ini:

“Dapat bantuan beras ini udah lama, setiap 2 bulan dikasih beras, saya sangat terbantu dengan adanya beras gratis ini mbak” (Wawancara hari Kamis, 23 Mei 2024)

Kepala desa Sumengko juga menyatakan hal serupa, sebagai berikut: “Masyarakat yang menerima bansos ini ya tentunya sangat antusias, rata-rata mereka memberikan sikap yang positif terhadap program ini, karena mereka dapat meringankan beban dari kebutuhan pokok”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program bansos beras bagi KPM dapat dinilai dengan baik. Bantuan ini dirasakan masyarakat penerima sebagai dorongan positif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka meskipun masih belum merata dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan Evaluasi Program Bantuan Sosial KPM Bagi Masyarakat Miskin Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro diketahui program ini dari pemerintah pusat dengan upaya mensejahterakan rakyat, membantu meringankan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan. Penelitian ini dijabarkan dengan menggunakan model evaluasi dari William N Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Dilihat dari indikator efektivitas, pelaksanaan program bantuan sosial KPM ini sudah efektif meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih beberapa masyarakat miskin yang belum mendapatkan atau belum ikut menerima bantuan sosial tersebut dikarenakan dengan adanya keterbatasan kuota yang ada.

Pada indikator efisiensi sumber dana program bansos ini berasal dari pemprov dan pemkab/pemkot yang mengalokasikan pada APBD belanja bansos untuk menambah pagu penerima bansos pangan bagi keluarga yang dianggap miskin. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana juga dibentuknya tim panitia untuk mengoordinasi, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi program bansos ini agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal. Usaha dari pemerintah desa yang mendata mengumpulkan KPM atau masyarakat miskin dan mengajukannya ke pemerintah pusat agar mendapatkan bansos beras tersebut.

Pada indikator kecukupan, program bansos KPM ini belum dianggap maksimal karena kurangnya pasokan beras yang tersedia dibandingkan dengan adanya jumlah Masyarakat miskin. Sehingga terjadi adanya Masyarakat miskin yang termasuk KPM yang tidak ikut menerima bantuan sosial tersebut.

Pada indikator pemerataan, program ini di sasaran bagi Masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah ataupun tidak berpenghasilan, namun dikarenakan

kurangnya kuota beras yang masuk tidak dapat membagikan dengan rata, ada beberapa warga miskin yang belum mendapatkan bansos tersebut, dan ada juga orang yang dapat dikatakan mampu tetapi ikut mendapatkan bansos tersebut.

Dilihat dari indikator responsivitas yang mengarah pada kepuasan mendapat tanggapan yang cukup baik sejauh ini respon Masyarakat desa Sumengko masih bersifat positif dan diharapkan program ini agar selalu dapat berjalan. Masyarakat yang tidak menerima bansos pun juga merespon dengan baik, namun warga tidak mampu yang tidak mendapatkan bansos tersebut agak sedikit kecewa, namun disisilain mereka juga memaklumi hal tersebut karena kurangnya pasokan beras yang ada.

Pada indikator ketepatan secara umum jika dilihat dari persyaratan penerima bantuan sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU No.13/Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Namun apabila diteliti lebih dalam lagi dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian sasaran pada penerimaan bantuan sosial tersebut, ada beberapa warga tidak mampu yang tidak menerima bansos dan ada pula warga yang dapat disebut mampu namun menerima bansos tersebut.

5.2 Saran

1. Sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat penerima maupun Masyarakat bukan penerima perlu dilakukan lebih baik lagi, karena hal ini dapat memberi pemahaman lebih baik.
2. Pemerintah desa sebagai penitia serta pengurus lebih tegas lagi apa bila Masyarakat yang mampu tapi minta bansos.
3. Tenaga fasilitator lapangan beserta pemerintah desa alangkah lebih baiknya untuk mengutamakan warga yang benar benar membutuhkan untuk mendapatkan bansos tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Azlan Suhaini, 2019. Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Dinas Sosial Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- Alive M. Kawung, Johny Lumolos dan Stefanus. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada KPM di kelurahan Mahakeret.

Peraturan Perundang undangan

- Undang-undang Dasar Nomer 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang Dasar Nomer 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-undang Dasar Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Perpres Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
- Perpres Nomer 9 Tahun 2015 Tentang Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Inpres Nomer 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pogram Simping Keluarga Sejahtera
- Undang-undang Pasal 27 dan 34 Tentang Tanggungjawab Pemerintah dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

LAMPIRAN

Bukti Submit Artikel

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'Submissions | PERSPEKTIF'. The address bar shows the URL 'ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/submissions'. The page header is 'PERSPEKTIF' with a user profile icon and a notification bell. The main content area is titled 'Submissions' and has two tabs: 'My Queue' (with a count of 1) and 'Archives'. A 'Help' button is visible. Below the tabs is a section titled 'My Assigned' with a search bar and buttons for 'Filters' and 'New Submission'. A table lists a submission with ID '12928' by 'Rupiarsieh' titled 'EVALUASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL KPM BAGI MASYARAKAT MISKIN DESA SUMENGKO KECA...'. The table has buttons for 'Submission', 'View', and a dropdown arrow.

My Assigned		Search	Filters	New Submission	
12928	Rupiarsieh	EVALUASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL KPM BAGI MASYARAKAT MISKIN DESA SUMENGKO KECA...	Submission	View	